

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Ikjip

Tahun **2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Ahmad Dahlan No.1, Telp.(0322) 321168



Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik tanpa halangan yang berarti.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan selama satu tahun anggaran. Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2021.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang mendatang. Dan kepada segenap pihak yang turut membantu tersusunnya laporan ini, tiada kata yang paling pantas selain ucapan terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN**



ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19720205 199201 1 003

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. DATA UMUM ORGANISASI	12
1. Personil	14
2. Sarana dan Prasarana	15
3. Pembiayaan	25
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP	61
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	63
A. RENCANA STRATEGIS	63
1. Tujuan	63
2. Sasaran dan Indikator Sasaran	66
B. RENCANA KINERJA TAHUN TAHUN 2021	68
Program dan Kegiatan	68
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	68
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	69
A. Capaian Kinerja Organisasi	69
A.1 Pencapaian Kinerja	69
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	70
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA	70
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional ..	71

A.5	Analisa Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan	71
A.6	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	72
A.7	Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja	73
B.	Realisasi Anggaran	74
BAB IV	PENUTUP	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	77

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. Lampiran lainnya (penghargaan, inovasi dll.)

I *khtisar Eksekutif*

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kemampuan mempertanggungjawabkan dari suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan menyajikan laporan capaian kinerja (*performance result*) selama Tahun 2021 dan mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 serta Rencana Kerja Tahun 2021.

Untuk Mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan yaitu “ **Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing** “ dan misi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Misi yang ke-4, yaitu : **Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik**, Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan visi misi di atas adalah : Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik governance (e-GOV).

Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah : Meningkatnya implementasi e-GOV.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, sasaran dibuat dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Berikut adalah alat untuk mengukur keberhasilan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021

Meningkatnya implementasi e-GOV, indikator kinerjanya adalah :

1. Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi : 15%
2. Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik : 100%

Pendahuluan

**BAB
1**

A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi saat ini, reformasi birokrasi sudah merupakan kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan. Pada hakekatnya reformasi birokrasi adalah merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur bisa juga diartikan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki, menyempurnakan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif

Peran Teknologi Informasi dalam Reformasi Birokrasi adalah interaksi pemerintah dan masyarakatnya yang dilakukan secara elektronik (digital), meliputi interaksi secara digital dalam pemerintahan yang baik, informasi dan komunikasi dan rekayasa ulang ketatalaksanaan pada setiap tingkatan pemerintahan. Peran teknologi informasi dalam reformasi birokrasi biasa disebut juga dengan e-GOV yaitu suatu upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat.

Guna mengukur sejauh mana penerapan e-GOV di suatu instansi pemerintah, khususnya kantor pengolahan data elektronik, maka dibuatlah laporan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pencapaian suatu target yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap membandingkan perencanaan (target) dan hasil yang dicapai.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok

Diskominfo mempunyai tugas Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika serta persandian dan statistik.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas DISKOMINFO juga menjalankan fungsi-fungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-government
- b. perencanaan teknis program kerja bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik
- c. pembinaan teknis program kerja bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-government
- d. pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- f. pembinaan ketatausahaan dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Uraian Tugas Masing - Masing Jabatan dalam Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan

pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, dan asset, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian;
- 2) penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 3) penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 4) penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- 5) penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- 7) penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- 8) penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- 9) penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LKJIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- 10) penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 11) penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- 12) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat terdiri dari :

- a) Sub Bagan Perencanaan dan Evaluasi;
- b) Sub Bagan Keuangan,

c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- (1) melaksanakan penyusunan program kena Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- (2) melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- (3) melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- (4) melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- (5) melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- (7) melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
- (8) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- (9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- (1) melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- (2) melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- (3) melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- (4) melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- (5) melaksanakan verifikasi keuangan;

- (6) melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- (7) melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- (8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Keuangan;
- (9) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- (1) melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- (3) melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- (4) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, kemandirian dan keamanan kantor;
- (5) melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset Dinas;
- (6) melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- (7) melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- (8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas;
- (9) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik *mempunyai fungsi :*

- 1) penyelenggaraan koordinasi dan verifikasi pelayanan informasi publik;
- 2) perumusan kebijakan kemitraan komunikasi publik;
- 3) pemantauan proses pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
- 4) penyelenggaraan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;
- 5) penyelenggaraan koordinasi hasil pengolahan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait;
- 6) penyelenggaraan koordinasi pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
- 7) penyelenggaraan koordinasi pengelolaan saluran komunikasi media publik;
- 8) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media publik;
- 9) perumusan pola pembinaan pelayanan informasi dan komunikasi publik;
- 10) penyelenggaraan monitoring dan evaluasi informasi dan komunikasi publik;
- 11) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :

- a) Seksi Manajemen Informasi dan Komunikasi Publik;
- b) Seksi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Komunikasi Publik;
- c) Seksi Media Publik

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Seksi Manajemen informasi dan Komunikasi Publik

Seksi Manajemen Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional monitoring informasi dan pengelolaan konten resmi Pemerintah Daerah;
- (2) menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan monitoring informasi media;
- (3) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyampaian informasi melalui media online resmi Pemerintah;

- (4) menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk identifikasi hasil pemantauan yang perlu ditetapkan sebagai agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah;
- (5) melaksanakan pengelolaan website, email resmi Pemerintah Daerah;
- (6) melaksanakan pengelolaan media online pengaduan masyarakat;
- (7) melaksanakan pengelolaan dan publikasi informasi publik;
- (8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Komunikasi Publik

Seksi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan sumber daya komunikasi publik;
- (2) menyiapkan bahan perumusan teknis sumber daya komunikasi publik;
- (3) menyiapkan bahan penguatan kapasitas dan kompetensi sumber daya komunikasi publik;
- (4) menyusun program dan rencana kegiatan serta pelaksanaan informasi publik melalui kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat;
- (5) menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya komunikasi publik;
- (6) menyiapkan bahan pelatihan dan pendarapangan untuk peningkatan kapasitas bagi anggota Kelompok Informasi Masyarakat;
- (7) melaksanakan pembinaan dan pendampingan Pejabat Pengelola Informasi Daerah pembantu;
- (8) melakukan Kerjasama dengan media bk cetak maupun online terkait pemberitaan di Daerah;
- (9) menyelenggarakan dokumentasi untuk setiap peristiwa, kegiatan, atau acara penting yang terjadi di Daerah;
- (10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Media Publik

Seksi Media Publik, mempunyai tugas:

- (1) Menyusun rencana program kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pendayagunaan media komunikasi publik;
- (2) melaksanakan program kegiatan petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pendayagunaan media Publik;
- (3) melaksanakan kegiatan penyiaran, pertura, kernitraan media;
- (4) melaksanakan pengelolaan Radio Pemerintah Daerah dan Media Center;
- (5) melakukan pengelolaan akun media sosial resmi Pemerintah Daerah;
- (6) menyebarluaskan informasi positif yang berkaitan dengan Daerah;
- (7) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA)

Bidang Aplikasi Informatika adalah unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Aplikasi Informatika, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang Aplikasi Informatika.

Bidang Aplikasi Informatika *mempunyai fungsi :*

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Aplikasi Informatika;
- 2) Penyusunan program kegiatan Aplikasi Informatika;
- 3) Perumusan kebijakan penyusunan norma standar prosedur, fasilitasi, dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi layanan publik e-Government;
- 4) Pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi dan aplikasi informatika
- 5) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari :

- a) Seksi Tata Kelola dan pemberdayaan TIK;
- b) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
- c) Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK.

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aplikasi Informatika.

Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK

Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan TIK, mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan penyusunan pedoman/ kebijakan serta pemantauan, evaluasi di bidang teknologi informasi komunikasi;
- (2) melaksanakan perencanaan tata — kelola informatika untuk menata proses, sekaligus memasukkan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dengan menyusun Rencana Induk Teknologi Informatika dan Komunikasi yang mendukung ekosistem kota cerdas;
- (3) mengkoordinasikan pelaksanaan implementasi Rencana Induk yang mendukung ekosistem kota cerdas,
- (4) mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- (5) melaksanakan kajian dan analisis sebagai bahan dalam menyusun rancangan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah,
- (6) melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis Sumber Daya Manusia guna meningkatkan kualitas sesuai dengan perkembangan di bidang teknologi informasi,
- (7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database, mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Aplikasi dan Integrasi sistem informasi;
- (2) melakukan penyiapan bahan pengajuan persyaratan nama domain instansi beserta hostingnya;
- (3) melakukan penyiapan bahan fasilitasi, pengelolaan, evaluasi dan monitoring bagi nama domain instansi beserta sub domainnya;

- (4) melaksanakan kajian dan analisis sebagai bahan penyusunan rancangan operasional pembangunan dan pengembangan aplikasi mendukung sistem informasi manajemen di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (5) melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen dan aplikasi yang terintegrasi dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melalui media intranet dan internet sebagai langkah untuk mewujudkan Sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi;
- (6) melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta inovasi di bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi dengan menerapkan sistem informasi terintegrasi pada pembangunan dan pengembangan daerah yang tertinggal di bidang Teknologi Informasi;
- (7) memberikan rekomendasi perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pengembangan aplikasi atau sistem informasi pada instansi Pemerintah Daerah;
- (8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Infrastruktur TIK

Seksi Infrastruktur TIK, mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi;
- (2) melaksanakan pengelolaan jaringan internet dan internet Pemerintah Daerah;
- (3) melaksanakan pengelolaan Data Center dan Comand Center;
- (4) memberikan rekomendasi perencanaan dan penganggaran pembangunan dan pengembangan infrastruktur — Teknologi Informatika dan Komunikasi seperti Hardware pada instansi Pemerintah Daerah;
- (5) menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi;

(6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian adalah unsur pelaksana Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik dan Persandian, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Statistik dan Persandian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi di Daerah

Bidang Statistik dan Persandian *mempunyai fungsi* :

- 1) perumusan kebijakan teknis operasional bidang statistik, persandian dan keamanan informasi;
- 2) penyelenggaraan rencana kerja bidang statistik, persandian dan keamanan informasi;
- 3) penyelenggaraan rencana kerja bidang statistik, persandian dan keamanan informasi;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang Statistik, persandian dan keamanan informasi;
- 6) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :

- a) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
- b) Seksi Pengolahan Data dan Statistik
- c) Seksi Sumber Daya Statistik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas

- (1) menyiapkan bahan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Persandian dan Keamanan Informasi;

- (2) mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis terkait keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah ;
- (3) menyiapkan bahan koordinasi , sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan dan penguatan persandian dan keamanan informasi;
- (4) menyiapkan bahan pelaksanaan jaringan persandian;
- (5) melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
- (6) melaksanakan pengelolaan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian, dan jaring komunikasi sandi;
- (7) melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan
- (8) komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengolahan Data dan Statistik

Seksi Pengolahan Data dan Statistik, mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, klasifikasi, verifikasi dan stratifikasi data statistik sektoral;
- (2) melaksanakan pengelolaan data statistik sektoral;
- (3) melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan data statistik sektoral ;
- (4) membangun meta data statistik;
- (5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sumber Daya Statistik

Seksi Sumber Daya Statistik, mempunyai tugas:

- (1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya statistik sektoral;

- (2) menyiapkan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria penyelenggaraan statistik sektoral;
- (3) melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- (4) melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan sumber daya statistik;
- (5) melaksanakan bimbingan teknis dan supervise terkait layanan statistik sektoral;
- (6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan sumber daya statistik sektoral;
- (7) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. DATA UMUM ORGANISASI

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang membawa banyak perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia. Dengan teknologi, manusia dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan lebih cepat dan mudah. Hal inilah yang mengakibatkan mau tidak mau manusia dituntut untuk terus mengikuti perkembangan yang ada jika tidak ingin tertinggal oleh kemajuan zaman.

Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan dilaksanakannya electronic Government (e-Government) yaitu aktifitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam kaitannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, maupun kelompok terkait lainnya. Tidak mengherankan jika saat ini berbagai perangkat teknologi telah banyak dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian tugas-tugas aparatur pemerintah. Inilah salah satu dari sekian tugas yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.

Dengan electronic Government, penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan bisa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu terselenggaranya e-Government akan sangat mendukung terciptanya *Good Governance*. Sehubungan dengan pengembangan e-Gov di Kabupaten Lamongan,

DISKOMINFO juga telah memfasilitasi pembuatan sekaligus penggunaan beberapa aplikasi pada 2017. Aplikasi-aplikasi tersebut diwujudkan :

- Aplikasi GIS Proyek
- Aplikasi Integrasi e- Planning, e-budgetting dan e-controlling
- Aplikasi Pelaporan Absensi Online
- Aplikasi Portal Smart City / Silly
- Aplikasi Potensi Kabupaten Lamongan
- Aplikasi Sistem informasi Statistik

Sedangkan pada tahun 2018 telah disusun dan dikembangkan beberapa aplikasi/software antara lain:

1. Aplikasi Smart City Lanjutan merupakan kelanjutan aplikasi Smart City yang dirancang sebagai portal aplikasi yang memberikan kemudahan akses seluruh layanan aplikasi di Kabupaten Lamongan serta sebagai akses informasi fasilitas dan pelayanan Pemkab Lamongan yang berbasis android. Upgrade dalam aplikasi ini terutama untuk penambahan fitur dan update database yang masih belum lengkap. Beberapa diantaranya pada modul pendidikan, wisata, fasilitas umum, layanan umum, pemerintahan, restoran dan modul darurat.
2. Upgrade Aplikasi Pelaporan Absensi Aplikasi pelaporan absensi adalah aplikasi yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai yang meliputi jumlah jam kehadiran, jumlah waktu keterlambatan serta jumlah ketidak hadiran pegawai baik karena izin sakit, cuti maupun izin lainnya. Adapun upgrade aplikasi pelaporan aplikasi ini meliputi penambahan fitur update GUI dengan fungsi semisal spreadsheet, penambahan parameter, perhitungan presensi, fasilitas entri data izin, integrasi dengan telegram, monitoring mesin fingerprint jika tidak tersambung lebih dari 1 hari ke telegram, data status update penarikan data log scan terakhir, alarm jam mesin fingerprint yang selisih lebih dari 5 menit, web apai untuk integrasi dengan e performance.
3. Aplikasi e-Aperkat (Aplikasi Pelaporan Program dan Kegiatan Terpadu Elektronik) merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk monitoring sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan pada semua bidang telah sesuai dengan pelaksanaannya serta untuk monitoring

pelaksanaan program dan kegiatan perbulan, tiga bulan, semester dan tahunan.

Untuk output aplikasi sebagaimana terlampir.

Aplikasi portal layanan Lamongan ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat kabupaten Lamongan untuk mendapatkan informasi tentang potensi Kabupaten Lamongan

Sedangkan Aplikasi bank data bertujuan untuk menyimpan data-data dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Lamongan yang perlu dipublikasikan, sehingga dapat dengan mudah mencari, mendownload data – data bagi yang membutuhkan.

Pada tahun 2019, pengembangan aplikasi diutamakan dalam hal pengintegrasian aplikasi, sampai akhir 2019, aplikasi-aplikasi yang telah terintegrasi, adalah: 1. E-planning dengan e-budgeting, 2. Siapman dengan e-performance, 3. Paten, E-PBB, Perzela, RSUD, Dinkes dengan Disduk Capil.

Pada di tahun 2020, pengintegrasian aplikasi dilanjutkan dengan lamongan store, lamongan tourism, warla yang masing-masing terintegrasi dengan aplikasi silala.

Saat ini tahun **2021**, dikembangkannya aplikasi SIAPMAN menjadi versi 2.0 dengan banyak fitur baru diantaranya terkoneksi dengan mesin absensi secara online dan real time, fitur kalkulasi presentase kehadiran dan pengurangan TPP, serta fitur notifikasi melalui telegram admin. Diintegrasikannya aplikasi sioppah (Sistem Online Pemantauan Produk Hukum) dengan aplikasi silala.

Berikut adalah gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari personil, sarana prasarana dan pembiayaan.

1). Personil

Jumlah personil dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan sebanyak 41

orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	24 orang	(52.17%)
2	CPNS	3 orang	(6.53%)
3	Honorer	19 orang	(41.30%)
Jumlah		46 orang	(100%)

b. Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	15 orang	(55.55%)
2	Jabatan Fungsional Umum	12 orang	(44.45%)
Jumlah		27 orang	(100%)

c. Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.b	1 orang	(3.70%)
2	Eselon III.a	1 orang	(3.70%)
3	Eselon III.b	3 orang	(11.11%)
4	Eselon IV.a	10 orang	(37.04%)
5	Staf	12 orang	(44.45%)
Jumlah		27 orang	(100%)

d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang

No.	Golongan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Golongan IV	6 orang	(13.05%)
2	Golongan III	18 orang	(39.13%)
3	Golongan II	2 orang	(4.35%)
4	Golongan I	1 orang	(2.17%)
5	Honorer	19 orang	(41.30%)
Jumlah		46 orang	(100%)

e. Komposisi Pendidikan PNS/CPNS :

No.	Pendidikan PNS/CPNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	1 orang	(4.17%)
2	D3	3 orang	(12.5%)
3	D4/S1	15 orang	(50%)
4	S2	8 orang	(33.33%)
Jumlah		27 orang	(100%)

f. Komposisi Pendidikan Pegawai Honorer :

No.	Pendidikan Honorer	Jumlah	Prosentase
1	D3	2 orang	(11.77%)
2	S1/D4	11 orang	(64.70%)
3	SMA	6 orang	(23.53%)
Jumlah		19 orang	(100%)

g. Data pegawai menurut Gender :

No.	Pegawai menurut gender	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	33 orang	(68%)
2	Perempuan	13 orang	(32%)
Jumlah		46 orang	(100%)

2). Sarana dan Prasarana

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki DISKOMINFO telah mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja.

JUMLAH ASSET DINAS KOMINFO KAB. LAMONGAN

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	1	Bidang	Sertifikat BPKAD
2.	Alat-alat berat	1	Buah/set	Genset
3.	Alat-alat angkutan	12	Buah	Roda Empat dan Roda Dua
4.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	2	Buah	Las Listrik
5.	Alat kantor dan rumah tangga	936	Buah	Barang-barang inventaris
6.	Alat studio dan komunikasi	101	Buah	Kamera, Kamera Drone, DVD, Rig, LED Televisi

				(Video Wall System) dll
7.	Alat-alat laboratorium	-	-	-
8.	Bangunan gedung	3	Buah	DISKOMINFO, Puskom Kreatif, Radio Suara Lamongan
9.	Jaringan	70	Buah	Jaringan internet
	Jumlah	1126		

**JUMLAH PERANGKAT KERAS KOMPUTER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LAMONGAN**

NO.	NAMA APLIKASI	FUNGSI APLIKASI	JUMLAH	ONLINE/OFFLINE
1.	PC. Client untuk DISKOMINFO	1	Unit	CPU Clint Server
3.	Router	92	Unit	Pembagian line internat
4.	Server	10	Unit	Induk server
5.	PC. Client Seksi	3	Unit	CPU internet untuk 3 Seksi
6.	PC. Client Tata Usaha	1	Unit	CPU Staf DISKOMINFO
8.	PC. Client untuk Staf	23	Unit	CPU staf DISKOMINFO
9.	Laptop	30	Unit	Laptop di DISKOMINFO
10.	PC Client di Puskom Kreatif	13	Unit	CPU untuk pelatihan
11.	Wavelan	7	Unit	Wifi internet
12.	Unit Power Supply	42	Unit	DISKOMINFO
13.	Jaringan Komputer	1	Unit	DISKOMINFO
14.	HDD External	1	Unit	DISKOMINFO
15.	CERTIFIKAT SSL	2	Unit	DISKOMINFO
16.	PC. Unit	60	Unit	DISKOMINFO

17.	Anti virus Windows server	1	Unit	DISKOMINFO
18.	Main Frame	2	Unit	DISKOMINFO
19.	Rackmount	25	Unit	DISKOMINFO
20.	Firewall Server	1	Unit	DISKOMINFO
21.	Antivirus email server	1	Unit	DISKOMINFO
22.	Note Book	5	Unit	Note book Diskominfo
23.	PC ALL IN ONE	1	Unit	PC Diskominfo
24.	Mesin Absensi	257	Unit	DISKOMINFO
25.	Amplifier	1	Unit	DISKOMINFO
25.	Routerboard	4	Buah	DISKOMINFO

TABEL
JUMLAH PERANGKAT LUNAK KOMPUTER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LAMONGAN

NO	NAMA APLIKASI	FUNGSI APLIKASI	JUMLAH	ONLINE/OFFLINE
1	Email resmi OPD	Surat menyurat elektronik	1 bh	Online
2	Website resmi	Informasi dan Kegiatan OPD	1 bh	Online
3	e-surat	Aplikasi surat menyurat, disposisi, arsip	1 bh	offline
4	SIMPEG	Data kepegawaian	1 bh	Online
5	ELOK/e LAPORAN KEPEGAWAIAN	Sistem aplikasi kepegawaian	1 bh	Online
6	SAKTI	Aplikasi pengelolaan keuangan, akuntansi dan aset	1bh	Online
7	e-tracking surat	Untuk menemukan kembali informasi surat masuk keluar	1bh	Offline

8	SIPPD	Upload Musrenbang	1bh	Online
9	SISKA	Sistem informasi usulan Musrenbang Kecamatan	1bh	Online
10	Sistem Aspirasi Warga	Sebagai aplikasi penampung aspirasi warga	1bh	Online
11	Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIPPD	Mengelola dan mendokumentasikan data dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat SKPD maupun tingkat Kabupaten Lamongan	1bh	Online
12	PATEN	Administrasi terpadu kecamatan	1bh	Offline (rencana online)
13	JDIH	Menampilkan informasi produk tati di Kabupaten Lamongan	1bh	Online
14	Monev Keuangan	Monitoring dan evaluasi realisasi keuangan	1bh	Online
15	Monev Fisik	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	1bh	Online
16	SPSE	Aplikasi untuk pengadaan secara elektronik	1bh	Online
17	SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	1bh	Online
18	PADE	Sistem informasi untuk administrasi desa	1bh	Offline
19	SIMKUDES	Sistem informasi administrasi dan keuangan desa	1bh	Offline
20	E-FILING	Laporan SPT Tahunan Pribadi	1bh	Online
21	DB gaji	Administrasi Penggajian	1bh	Offline
22	Lamongan Tour Guide	Untuk informasi tempat	1bh	Online

		pariwisata dan fasilitas publik di Lamongan		
23	ASPAK(Aplikasi sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan)	Untuk mengetahui informasi data sarana, prasarana dan peralatan kesehatan	1bh	Online
24	KOMDAT	Pelaporan data kesehatan	1bh	Online
25	SPM	Pelaporan data SPM secara elektronik	1bh	Online
26	E- Renggar	Pelaporan realisasi dana DAK	1bh	Online
27	SIHA (Sistem Informasi HIV	memudahkan dalam membuat dan melakukan	1bh	offline
28	SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS)	memudahkan dalam membuat dan melakukan monev program HIV AIDS	1bh	Online
29	E-SISMAL (Program malaria)	memudahkan dalam pencatatan dan monev program malaria	1bh	Offline
30	SIPK (kusta)	memudahkan dalam pencatatan dan monev program kusta	1bh	Offline
31	SITT (Program TB)	memudahkan dalam pencatatan dan monev program TB	1bh	Online
32	Program Pelaporan ISPA	memudahkan dalam pencatatan dan monev program ISPA	1bh	Offline
33	Anjab ABK	Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan melalui metode ABK	1bh	Online
34	Agregat SDMK	Fungsi dan jumlah penyebaran tenaga kesehatan	1bh	Offline
35	SIKDA Generik	Untuk administrasi pelaporan kesehatan	1bh	Online

36	E-MON	Monitoring DAK	1bh	Online
37	SIAK	Sistem informasi administrasi kependudukan	1bh	Online
38	PERZELA (Perizinan Elektronik Lamongan)	Pelayanan Perizinan	1bh	Online
39	Aplikasi Arsip Perijinan	untuk manajemen penyimpanan dan pengelolaan arsip dokumen perijinan	1bh	Offline
40	SIMA BMN	Untuk pengelolaan tati perikanan	1bh	
41	GIS Perikanan	Untuk memetakan potensi perikanan budidaya di Lamongan	1bh	Online
42	Edalwas	Untuk evaluasi pengendalian dan pengawasan kegiatan di perikanan	1bh	Online
43	SAIBA	Untuk pelaporan akutansi	1bh	Online
44	Simfoni PPA	Pengiriman data kasus secara online	1bh	Online
45	Aplikasi Tata Naskah Dinas elektronik	Pelayanan administrasi tata naskah dinas yang cepat, efisien dan efektif menuju e-Government	1bh	Online
46	Aplikasi 10 Juta Kesempatan kerja	Mempercepat informasi pasar kerja perusahaan (lowongan pekerjaan) dalam dan luar daerah	1bh	
47	Aplikasi E-AK I	Aplikasi registrasi kartu pencari kerja	1bh	Offline
48	Aplikasi Sistem Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Kerja Luar	Menginput data CTKI	1bh	Online

	Negeri (KTKLN)			
49	Sistem Informasi Penyusunan Pelaporan Data Ketenagakerjaan (SIP2DK)	Manajemen pelaporan hasil kegiatan pelatihan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian	1bh	Online
50	Info Kerja Jatim	untuk memberikan informasi lowongan kerja bagi masyarakat	1bh	Online
51	Bank sampah	Sebagai administrasi pengelolaan sampah	1bh	Online
52	GIS Potensi Pencemaran Lingkungan	Menyajikan data spasial potensi pencemaran lingkungan dan tatisti di kab. Lamongan	1bh	Online
53	Aplikasi TPSLB3	Untuk menerbitkan rekomendasi ijin lingkungan	1bh	Online
54	APPEL	input bahan pustaka & Anggota perpustakaan - searching bahan pustaka	1bh	Online
55	SIERKEL	input rencana kerja	1bh	Online
56	E-PBB	Menangani Pajak Bumi Bangunan (PBB)	1bh	Online
57	Sistem Informasi Geografis (SIG)	Peta PBB se Kab Lamongan	1bh	Offline
58	Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA)	Menangani Pajak Hotel,Restoran,Hiburan,Pe neran gan jalan, Parkir,Air Tanah,Sarang burung tatis, dan minerba	1bh	Online
59	Sistem informasi manajemen pajak BPHTB (SIM-BPHTB)	Menangani pajak BPHTB	1bh	Online
60	Sistem informasi manajemen pajak	Menangani pajak reklame	1bh	Online

	reklame (SIM-REKLAME)			
61	Survey kepuasan pelanggan	Survey terhadap wajib pajak di Bapenda	1bh	Offline
62	Sistem Informasi manajemen(SIM) Surat	Pengadministrasian surat keluar masuk dan pengarsipan surat	1bh	Offline
63	Sistem Informasi manajemen(SIM) Pustaka Perundangan	Menghimpun data pustaka peraturan perundang-undangan dalam bentuk digital	1bh	Offline
64	Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SIPPMAS)	Mengelola pengaduan masyarakat	1bh	Online
65	Sistem Informasi Pelayanan Informasi Pasar	Laporan informasi harga ternak	1bh	Online
66	ISIKHNAS	Laporan Kesehatan hewan yang terintegrasi secara nasional	1bh	Online
67	E-Proposal	Pengajuan proposal kegiatan/bantuan	1bh	Online
68	Lamongan store	Penjualan online Produk UKM	1bh	Online
69	SIM Billing	Untuk informasi tagihan, daftar pasien, tatisti dan entri obat	1bh	Online (intranet)
70	SIKLUS	Untuk proses pengelolaan dan keuangan BLUD	1bh	Online (intranet)
71	Ina DRG	Untuk penghitungan klaim biaya	1bh	Online (intranet)
72	Aplikasi GIS Proyek	untuk memudahkan stake holder dalam memantau lokasi proyek serta tatisti dari proyek tersebut yang disajikan berbasis GIS	1bh	Online

		(Geographic Information System).		
73	Aplikasi Integrasi e-Planning, ebudgetting dan e-controlling	untuk mengakses informasi, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran serta kemudahan dalam proses monitoring dan evaluasi.	1bh	Online
74	Aplikasi Pelaporan Absensi Online	untuk monitoring dan evaluasi kedisiplinan pegawai	1bh	Online
75	Aplikasi Portal Smart City / Silly	memberikan kemudahan akses seluruh layanan aplikasi di Kabupaten Lamongan serta sebagai akses informasi fasilitas dan pelayanan Pemkab Lamongan yang berbasis android.	1bh	Online
76	Aplikasi Potensi Kabupaten Lamongan	Menyediakan Sistem Informasi Potensi Daerah yang disajikan dalam menunjang e-Government	1bh	Online
77	Aplikasi Sistem informasi Statistik	untuk menginformasikan statistik dari potensi-potensi yang ada di kabupaten Lamongan	1bh	Online

TABEL
JUMLAH SARANA PENDUKUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Nama Barang	Jumlah	satuan	Keterangan
1	Handycam	2	Unit	Puskom Kreatif dan DISKOMINFO
2	Camera Digital	2	Unit	DISKOMINFO
3	Hub Switch	11	Unit	Server
4	Wave Lan	7	Unit	DISKOMINFO
5	UPS	3	Unit	Server
6	Printer	27	Unit	Masing-masing Bidang
7	Scaner	2	Unit	TU
8	Lcd Proyektor	2	Unit	DISKOMINFO dan Puskom
9	Dvd Player	1	Unit	Puskom Creative
10	Soundsystem	1	Unit	DISKOMINFO
11	Action Camera Video	2	Unit	DISKOMINFO
12	Lensa Kamera	2	Unit	DISKOMINFO
13	Televisi	1	Unit	Televisi di Diskominfo
14	Loudspeaker	2	Unit	DISKOMINFO
15	Antena	27	Unit	Kecamatan
16	LCD Drawer Rackmount	12	Unit	DISKOMINFO (Command Center)
17	Kabel UTP	6	Meter	DISKOMINFO (Command Center)
18	LED Televisi (Video Wall System)	1	Paket	DISKOMINFO (Media Center)
19	Lain-lain	18	Unit	DISKOMINFO (Command Center)

3). Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 dengan alokasi Anggaran sebesar Rp. 10.944.739.711,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.708.691.883,00 atau dengan prosentase rata-rata mencapai 97,84%. Dana tersebut berasal dari APBD Kabupaten Lamongan tahun 2021, dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagaimana tabel berikut :

Kode											Uraian		Jumlah Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Lebih / (Kurang)	
1											2		3	4	(Rp.)	%
															5	
											BELANJA		10,944,739,711.00	10,708,691,882.90	236,047,828.10	97.84
2.16	19	01									PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,916,091,911.00	4,725,811,160.40	190,280,750.60	96.13
2.16	19	01	2.01								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		53,000,000.00	52,005,000.00	995,000.00	98.12
2.16	19	01	2.01	01							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	01	5	1					BELANJA OPERASI		8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa		8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	01			Belanja Barang		8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis		8,000,000.00	8,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		-	-	-	-
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		4,115,500.00	4,115,500.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1,812,300.00	1,812,300.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		970,200.00	970,200.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		1,102,000.00	1,102,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		-	-	-	-
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	02			Belanja Jasa		-	-	-	-

2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	-	-	-	-
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	02	01	0007	Honorarium Rohaniwan	-	-	-	-
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	-	-	-	-
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	-	-
2.16	19	01	2.01	01	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-
2.16	19	01	2.01	07							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,000,000.00	44,005,000.00	995,000.00	97.79
2.16	19	01	2.01	07	5	1					BELANJA OPERASI	45,000,000.00	44,005,000.00	995,000.00	97.79
2.16	19	01	2.01	07	5	1	01				Belanja Pegawai	-	-	-	-
2.16	19	01	2.01	07	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-
2.16	19	01	2.01	07	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	-	-	-	-
2.16	19	01	2.01	07	5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-
2.16	19	01	2.01	07	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	45,000,000.00	44,005,000.00	995,000.00	97.79
2.16	19	01	2.01	07	5	1	02	01			Belanja Barang	11,500,000.00	11,500,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	07	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	11,500,000.00	11,500,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	07	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,150,900.00	1,150,900.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	07	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,918,500.00	4,918,500.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	07	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,539,100.00	2,539,100.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	07	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	687,500.00	687,500.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	07	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,204,000.00	2,204,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.01	07	5	1	02	02			Belanja Jasa	33,500,000.00	32,505,000.00	995,000.00	97.03
2.16	19	01	2.01	07	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	33,500,000.00	32,505,000.00	995,000.00	97.03
2.16	19	01	2.01	07	5	1	02	02	09	0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	33,500,000.00	32,505,000.00	995,000.00	97.03
2.16	19	01	2.01	07	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	-	-	-	-
2.16	19	01	2.01	07	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	-	-

2.16	19	01	2.01	07	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-
2.16	19	01	2.02								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,152,184,911.00	3,041,316,561.00	110,868,350.00	96.48
2.16	19	01	2.02	01							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,122,184,911.00	3,011,316,561.00	110,868,350.00	96.45
2.16	19	01	2.02	01	5	1					BELANJA OPERASI	3,122,184,911.00	3,011,316,561.00	110,868,350.00	96.45
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01				Belanja Pegawai	3,122,184,911.00	3,011,316,561.00	110,868,350.00	96.45
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,795,190,000.00	1,732,721,947.00	62,468,053.00	96.52
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN	1,341,740,000.00	1,288,184,566.00	53,555,434.00	96.01
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,341,740,000.00	1,288,184,566.00	53,555,434.00	96.01
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	117,660,000.00	117,641,006.00	18,994.00	99.98
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	117,660,000.00	117,641,006.00	18,994.00	99.98
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162,750,000.00	161,670,000.00	1,080,000.00	99.34
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162,750,000.00	161,670,000.00	1,080,000.00	99.34
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	29,680,000.00	23,080,000.00	6,600,000.00	77.76
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29,680,000.00	23,080,000.00	6,600,000.00	77.76
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	73,730,000.00	73,723,560.00	6,440.00	99.99
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	73,730,000.00	73,723,560.00	6,440.00	99.99
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,130,000.00	3,513,784.00	616,216.00	85.08
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4,130,000.00	3,513,784.00	616,216.00	85.08
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	20,000.00	18,240.00	1,760.00	91.20
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000.00	18,240.00	1,760.00	91.20
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	54,860,000.00	54,383,145.00	476,855.00	99.13
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54,860,000.00	54,383,145.00	476,855.00	99.13
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3,270,000.00	3,240,554.00	29,446.00	99.10
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3,270,000.00	3,240,554.00	29,446.00	99.10
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7,350,000.00	7,267,092.00	82,908.00	98.87
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7,350,000.00	7,267,092.00	82,908.00	98.87

2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	-	-
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	01	12	0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	-	-	-	-
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,314,994,911.00	1,270,794,614.00	44,200,297.00	96.64
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,314,994,911.00	1,270,794,614.00	44,200,297.00	96.64
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,314,994,911.00	1,270,794,614.00	44,200,297.00	96.64
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12,000,000.00	7,800,000.00	4,200,000.00	65.00
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	12,000,000.00	7,800,000.00	4,200,000.00	65.00
2.16	19	01	2.02	01	5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12,000,000.00	7,800,000.00	4,200,000.00	65.00
2.16	19	01	2.02	01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
2.16	19	01	2.02	01	5	1	02	01			Belanja Barang	-	-	-	-
2.16	19	01	2.02	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	-	-	-	-
2.16	19	01	2.02	01	5	1	02	01	01	0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	-
2.16	19	01	2.02	05							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	05	5	1					BELANJA OPERASI	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	05	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	05	5	1	02	01			Belanja Barang	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	05	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	05	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,847,000.00	1,847,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	05	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6,793,100.00	6,793,100.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	05	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	707,900.00	707,900.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	05	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5,652,000.00	5,652,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	07							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	07	5	1					BELANJA OPERASI	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	07	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00

2.16	19	01	2.02	07	5	1	02	01			Belanja Barang	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	07	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	07	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,365,000.00	1,365,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	07	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5,803,000.00	5,803,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	07	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,594,500.00	1,594,500.00	-	100.00
2.16	19	01	2.02	07	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6,237,500.00	6,237,500.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	851,108,000.00	850,020,806.40	1,087,193.60	99.87
2.16	19	01	2.05	02							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1,108,000.00	1,108,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	02	5	1					BELANJA OPERASI	1,108,000.00	1,108,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	1,108,000.00	1,108,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	02	5	1	02	01			Belanja Barang	1,108,000.00	1,108,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	1,108,000.00	1,108,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	02	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	290,000.00	290,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	02	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	118,000.00	118,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	02	5	1	02	01	01	0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	700,000.00	700,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	02	5	1	02	01	01	0073	Belanja Pakaian KORPRI	-	-	-	-
2.16	19	01	2.05	02	5	1	02	01	01	0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	-
2.16	19	01	2.05	09							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-
2.16	19	01	2.05	09	5	1					BELANJA OPERASI	-	-	-	-
2.16	19	01	2.05	09	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
2.16	19	01	2.05	09	5	1	02	02			Belanja Jasa	-	-	-	-
2.16	19	01	2.05	09	5	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
2.16	19	01	2.05	09	5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-	-
2.16	19	01	2.05	10							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	850,000,000.00	848,912,806.40	1,087,193.60	99.87
2.16	19	01	2.05	10	5	1					BELANJA OPERASI	758,232,200.00	757,232,050.00	1,000,150.00	99.87

2.16	19	01	2.05	10	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	758,232,200.00	757,232,050.00	1,000,150.00	99.87
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	01			Belanja Barang	26,032,200.00	26,032,050.00	150.00	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	26,032,200.00	26,032,050.00	150.00	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,367,850.00	1,367,700.00	150.00	99.99
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	580,000.00	580,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	8,836,250.00	8,836,250.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,024,100.00	2,024,100.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,204,000.00	2,204,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11,020,000.00	11,020,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	02			Belanja Jasa	674,000,000.00	673,000,000.00	1,000,000.00	99.85
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	664,000,000.00	663,000,000.00	1,000,000.00	99.85
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19,000,000.00	18,000,000.00	1,000,000.00	94.74
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	620,000,000.00	620,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	02	12	0002	Belanja Sosialisasi	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	58,200,000.00	58,200,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	58,200,000.00	58,200,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58,200,000.00	58,200,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	2					BELANJA MODAL	91,767,800.00	91,680,756.40	87,043.60	99.91
2.16	19	01	2.05	10	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91,767,800.00	91,680,756.40	87,043.60	99.91
2.16	19	01	2.05	10	5	2	02	03			Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	60,000,000.00	59,912,956.40	87,043.60	99.85
2.16	19	01	2.05	10	5	2	02	03	01		Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	60,000,000.00	59,912,956.40	87,043.60	99.85
2.16	19	01	2.05	10	5	2	02	03	01	0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	60,000,000.00	59,912,956.40	87,043.60	99.85
2.16	19	01	2.05	10	5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00

2.16	19	01	2.05	10	5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	16,767,800.00	16,767,800.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	16,767,800.00	16,767,800.00	-	100.00
2.16	19	01	2.05	10	5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer	16,767,800.00	16,767,800.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06								Administrasi Umum Perangkat Daerah	178,826,400.00	167,808,512.00	11,017,888.00	93.84
2.16	19	01	2.06	01							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000.00	4,962,250.00	37,750.00	99.25
2.16	19	01	2.06	01	5	1					BELANJA OPERASI	5,000,000.00	4,962,250.00	37,750.00	99.25
2.16	19	01	2.06	01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	4,962,250.00	37,750.00	99.25
2.16	19	01	2.06	01	5	1	02	01			Belanja Barang	5,000,000.00	4,962,250.00	37,750.00	99.25
2.16	19	01	2.06	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	5,000,000.00	4,962,250.00	37,750.00	99.25
2.16	19	01	2.06	01	5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5,000,000.00	4,962,250.00	37,750.00	99.25
2.16	19	01	2.06	02							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,772,300.00	44,965,900.00	806,400.00	98.24
2.16	19	01	2.06	02	5	1					BELANJA OPERASI	3,533,000.00	2,727,900.00	805,100.00	77.21
2.16	19	01	2.06	02	5	1	01				Belanja Pegawai	800,000.00	-	800,000.00	-
2.16	19	01	2.06	02	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800,000.00	-	800,000.00	-
2.16	19	01	2.06	02	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	800,000.00	-	800,000.00	-
2.16	19	01	2.06	02	5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800,000.00	-	800,000.00	-
2.16	19	01	2.06	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	2,733,000.00	2,727,900.00	5,100.00	99.81
2.16	19	01	2.06	02	5	1	02	01			Belanja Barang	2,733,000.00	2,727,900.00	5,100.00	99.81
2.16	19	01	2.06	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	2,733,000.00	2,727,900.00	5,100.00	99.81
2.16	19	01	2.06	02	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	71,700.00	71,400.00	300.00	99.58
2.16	19	01	2.06	02	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	348,000.00	348,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	02	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,702,800.00	1,698,000.00	4,800.00	99.72
2.16	19	01	2.06	02	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	610,500.00	610,500.00	-	100.00

2.16	19	01	2.06	02	5	2					BELANJA MODAL	42,239,300.00	42,238,000.00	1,300.00	100.00
2.16	19	01	2.06	02	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42,239,300.00	42,238,000.00	1,300.00	100.00
2.16	19	01	2.06	02	5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6,618,700.00	6,618,000.00	700.00	99.99
2.16	19	01	2.06	02	5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	-
2.16	19	01	2.06	02	5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	-
2.16	19	01	2.06	02	5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6,618,700.00	6,618,000.00	700.00	99.99
2.16	19	01	2.06	02	5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6,618,700.00	6,618,000.00	700.00	99.99
2.16	19	01	2.06	02	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	35,620,600.00	35,620,000.00	600.00	100.00
2.16	19	01	2.06	02	5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	35,620,600.00	35,620,000.00	600.00	100.00
2.16	19	01	2.06	02	5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer	35,620,600.00	35,620,000.00	600.00	100.00
2.16	19	01	2.06	04							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,434,400.00	38,429,200.00	5,200.00	99.99
2.16	19	01	2.06	04	5	1					BELANJA OPERASI	38,434,400.00	38,429,200.00	5,200.00	99.99
2.16	19	01	2.06	04	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	38,434,400.00	38,429,200.00	5,200.00	99.99
2.16	19	01	2.06	04	5	1	02	01			Belanja Barang	31,121,800.00	31,119,100.00	2,700.00	99.99
2.16	19	01	2.06	04	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	31,121,800.00	31,119,100.00	2,700.00	99.99
2.16	19	01	2.06	04	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,185,200.00	11,182,500.00	2,700.00	99.98
2.16	19	01	2.06	04	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	19,936,600.00	19,936,600.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	04	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	7,312,600.00	7,310,100.00	2,500.00	99.97
2.16	19	01	2.06	04	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,312,600.00	7,310,100.00	2,500.00	99.97
2.16	19	01	2.06	04	5	1	02	03	02	0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	7,312,600.00	7,310,100.00	2,500.00	99.97
2.16	19	01	2.06	05							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	05	5	1					BELANJA OPERASI	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	05	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	05	5	1	02	01			Belanja Barang	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	05	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	05	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100.00

2.16	19	01	2.06	06							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25,500,000.00	24,980,000.00	520,000.00	97.96
2.16	19	01	2.06	06	5	1					BELANJA OPERASI	25,500,000.00	24,980,000.00	520,000.00	97.96
2.16	19	01	2.06	06	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	25,500,000.00	24,980,000.00	520,000.00	97.96
2.16	19	01	2.06	06	5	1	02	02			Belanja Jasa	25,500,000.00	24,980,000.00	520,000.00	97.96
2.16	19	01	2.06	06	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	25,500,000.00	24,980,000.00	520,000.00	97.96
2.16	19	01	2.06	06	5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9,600,000.00	9,450,000.00	150,000.00	98.44
2.16	19	01	2.06	06	5	1	02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15,900,000.00	15,530,000.00	370,000.00	97.67
2.16	19	01	2.06	09							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44,119,700.00	34,471,162.00	9,648,538.00	78.13
2.16	19	01	2.06	09	5	1					BELANJA OPERASI	44,119,700.00	34,471,162.00	9,648,538.00	78.13
2.16	19	01	2.06	09	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	44,119,700.00	34,471,162.00	9,648,538.00	78.13
2.16	19	01	2.06	09	5	1	02	01			Belanja Barang	17,463,700.00	17,328,300.00	135,400.00	99.22
2.16	19	01	2.06	09	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	17,463,700.00	17,328,300.00	135,400.00	99.22
2.16	19	01	2.06	09	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	190,800.00	190,000.00	800.00	99.58
2.16	19	01	2.06	09	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	74,000.00	72,000.00	2,000.00	97.30
2.16	19	01	2.06	09	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16,318,100.00	16,185,500.00	132,600.00	99.19
2.16	19	01	2.06	09	5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	880,800.00	880,800.00	-	100.00
2.16	19	01	2.06	09	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	26,656,000.00	17,142,862.00	9,513,138.00	64.31
2.16	19	01	2.06	09	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26,656,000.00	17,142,862.00	9,513,138.00	64.31
2.16	19	01	2.06	09	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,656,000.00	17,142,862.00	9,513,138.00	64.31
2.16	19	01	2.07								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05							Pengadaan Mebel	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	1					BELANJA OPERASI	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	1	02	01			Belanja Barang	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	-	-	-	-

2.16	19	01	2.07	05	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	1	02	03	02	0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	2					BELANJA MODAL	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	2	02	05	01	0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel	-	-	-	-
2.16	19	01	2.07	05	5	2	02	05	02	0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	-
2.16	19	01	2.08								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501,907,000.00	437,253,681.00	64,653,319.00	87.12
2.16	19	01	2.08	02							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66,915,000.00	46,824,313.00	20,090,687.00	69.98
2.16	19	01	2.08	02	5	1					BELANJA OPERASI	66,915,000.00	46,824,313.00	20,090,687.00	69.98
2.16	19	01	2.08	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	66,915,000.00	46,824,313.00	20,090,687.00	69.98
2.16	19	01	2.08	02	5	1	02	02			Belanja Jasa	66,915,000.00	46,824,313.00	20,090,687.00	69.98
2.16	19	01	2.08	02	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	66,915,000.00	46,824,313.00	20,090,687.00	69.98
2.16	19	01	2.08	02	5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon	11,000,000.00	80,140.00	10,919,860.00	.73
2.16	19	01	2.08	02	5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air	4,250,000.00	2,928,972.00	1,321,028.00	68.92
2.16	19	01	2.08	02	5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik	44,165,000.00	43,815,201.00	349,799.00	99.21
2.16	19	01	2.08	02	5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-
2.16	19	01	2.08	04							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	434,992,000.00	390,429,368.00	44,562,632.00	89.76

2.16	19	01	2.08	04	5	1					BELANJA OPERASI	434,992,000.00	390,429,368.00	44,562,632.00	89.76
2.16	19	01	2.08	04	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	434,992,000.00	390,429,368.00	44,562,632.00	89.76
2.16	19	01	2.08	04	5	1	02	01			Belanja Barang	-	-	-	-
2.16	19	01	2.08	04	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	-	-	-	-
2.16	19	01	2.08	04	5	1	02	01	01	0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	-
2.16	19	01	2.08	04	5	1	02	02			Belanja Jasa	434,992,000.00	390,429,368.00	44,562,632.00	89.76
2.16	19	01	2.08	04	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	397,600,000.00	358,851,000.00	38,749,000.00	90.25
2.16	19	01	2.08	04	5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	397,600,000.00	358,851,000.00	38,749,000.00	90.25
2.16	19	01	2.08	04	5	1	02	02	02		Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37,392,000.00	31,578,368.00	5,813,632.00	84.45
2.16	19	01	2.08	04	5	1	02	02	02	0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	31,236,000.00	26,584,940.00	4,651,060.00	85.11
2.16	19	01	2.08	04	5	1	02	02	02	0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1,596,000.00	1,248,357.00	347,643.00	78.22
2.16	19	01	2.08	04	5	1	02	02	02	0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4,560,000.00	3,745,071.00	814,929.00	82.13
2.16	19	01	2.09								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179,065,600.00	177,406,600.00	1,659,000.00	99.07
2.16	19	01	2.09	01							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22,888,800.00	22,862,400.00	26,400.00	99.88
2.16	19	01	2.09	01	5	1					BELANJA OPERASI	22,888,800.00	22,862,400.00	26,400.00	99.88
2.16	19	01	2.09	01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	22,888,800.00	22,862,400.00	26,400.00	99.88
2.16	19	01	2.09	01	5	1	02	01			Belanja Barang	22,888,800.00	22,862,400.00	26,400.00	99.88
2.16	19	01	2.09	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	22,888,800.00	22,862,400.00	26,400.00	99.88
2.16	19	01	2.09	01	5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12,596,800.00	12,570,400.00	26,400.00	99.79
2.16	19	01	2.09	01	5	1	02	01	01	0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10,292,000.00	10,292,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	02							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,176,800.00	34,544,800.00	1,632,000.00	95.49
2.16	19	01	2.09	02	5	1					BELANJA OPERASI	36,176,800.00	34,544,800.00	1,632,000.00	95.49
2.16	19	01	2.09	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	36,176,800.00	34,544,800.00	1,632,000.00	95.49
2.16	19	01	2.09	02	5	1	02	01			Belanja Barang	18,894,800.00	18,891,600.00	3,200.00	99.98

2.16	19	01	2.09	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	18,894,800.00	18,891,600.00	3,200.00	99.98
2.16	19	01	2.09	02	5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12,518,000.00	12,514,800.00	3,200.00	99.97
2.16	19	01	2.09	02	5	1	02	01	01	0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6,376,800.00	6,376,800.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	02	5	1	02	02			Belanja Jasa	8,250,000.00	6,621,200.00	1,628,800.00	80.26
2.16	19	01	2.09	02	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	8,250,000.00	6,621,200.00	1,628,800.00	80.26
2.16	19	01	2.09	02	5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8,250,000.00	6,621,200.00	1,628,800.00	80.26
2.16	19	01	2.09	02	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	9,032,000.00	9,032,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	02	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9,032,000.00	9,032,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	02	5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6,000,000.00	6,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	02	5	1	02	03	02	0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3,032,000.00	3,032,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	06							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	06	5	1					BELANJA OPERASI	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	06	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	06	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	06	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	06	5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15,000,000.00	15,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	06	5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	06	5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	06	5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	09							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95,000,000.00	94,999,400.00	600.00	100.00
2.16	19	01	2.09	09	5	1					BELANJA OPERASI	95,000,000.00	94,999,400.00	600.00	100.00
2.16	19	01	2.09	09	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	95,000,000.00	94,999,400.00	600.00	100.00
2.16	19	01	2.09	09	5	1	02	01			Belanja Barang	1,845,000.00	1,844,400.00	600.00	99.97

2.16	19	01	2.09	09	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	1,845,000.00	1,844,400.00	600.00	99.97
2.16	19	01	2.09	09	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	480,600.00	480,000.00	600.00	99.88
2.16	19	01	2.09	09	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	174,000.00	174,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	09	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	464,400.00	464,400.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	09	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	726,000.00	726,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	09	5	1	02	02			Belanja Jasa	8,700,000.00	8,700,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	09	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	8,700,000.00	8,700,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	09	5	1	02	02	01	0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8,700,000.00	8,700,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	09	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	84,455,000.00	84,455,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	09	5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84,455,000.00	84,455,000.00	-	100.00
2.16	19	01	2.09	09	5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	84,455,000.00	84,455,000.00	-	100.00
2.16	19	02									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1,697,000,000.00	1,691,474,062.50	5,525,937.50	99.67
2.16	19	02	2.01								Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,697,000,000.00	1,691,474,062.50	5,525,937.50	99.67
2.16	19	02	2.01	03							Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	200,000,000.00	200,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	03	5	1					BELANJA OPERASI	200,000,000.00	200,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	03	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	200,000,000.00	200,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	03	5	1	02	01			Belanja Barang	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	03	5	1	02	02			Belanja Jasa	200,000,000.00	200,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	03	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	200,000,000.00	200,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	03	5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	200,000,000.00	200,000,000.00	-	100.00

2.16	19	02	2.01	03	5	2						BELANJA MODAL	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	03	5	2	02					Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	03	5	2	02	10				Belanja Modal Komputer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	03	5	2	02	10	01			Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	03	5	2	02	10	01	0002		Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	04								Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100,000,000.00	99,945,400.00	54,600.00	99.95
2.16	19	02	2.01	04	5	1						BELANJA OPERASI	100,000,000.00	99,945,400.00	54,600.00	99.95
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02					Belanja Barang dan Jasa	100,000,000.00	99,945,400.00	54,600.00	99.95
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	01				Belanja Barang	12,389,600.00	12,335,000.00	54,600.00	99.56
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	01	01			Belanja Barang Pakai Habis	12,389,600.00	12,335,000.00	54,600.00	99.56
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	01	01	0026		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	01	01	0029		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	01	01	0035		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	8,554,600.00	8,500,000.00	54,600.00	99.36
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	01	01	0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,835,000.00	1,835,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	02				Belanja Jasa	62,610,400.00	62,610,400.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	02	01			Belanja Jasa Kantor	62,610,400.00	62,610,400.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	02	01	0003		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1,500,000.00	1,500,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	02	01	0008		Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	38,400,000.00	38,400,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	02	01	0039		Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	7,000,000.00	7,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	02	01	0046		Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	15,710,400.00	15,710,400.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	02	01	0047		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	04				Belana Perjalanan Dinas	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	04	01			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	04	01	0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-

2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	05			Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	05	01		Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	04	5	1	02	05	01	0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	25,000,000.00	25,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	04	5	2					BELANJA MODAL	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	04	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	04	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	04	5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	04	5	2	02	10	02	0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05							Pengelolaan Media Komunikasi Publik	577,000,000.00	576,537,712.50	462,287.50	99.92
2.16	19	02	2.01	05	5	1					BELANJA OPERASI	577,000,000.00	576,537,712.50	462,287.50	99.92
2.16	19	02	2.01	05	5	1	01				Belanja Pegawai	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	577,000,000.00	576,537,712.50	462,287.50	99.92
2.16	19	02	2.01	05	5	1	02	01			Belanja Barang	200,000.00	-	200,000.00	-
2.16	19	02	2.01	05	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	200,000.00	-	200,000.00	-
2.16	19	02	2.01	05	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200,000.00	-	200,000.00	-
2.16	19	02	2.01	05	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	1	02	02			Belanja Jasa	465,200,000.00	465,200,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	05	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	465,200,000.00	465,200,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	05	5	1	02	02	01	0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	465,200,000.00	465,200,000.00	-	100.00

2.16	19	02	2.01	05	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	111,600,000.00	111,337,712.50	262,287.50	99.76
2.16	19	02	2.01	05	5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	111,600,000.00	111,337,712.50	262,287.50	99.76
2.16	19	02	2.01	05	5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	111,600,000.00	111,337,712.50	262,287.50	99.76
2.16	19	02	2.01	05	5	2					BELANJA MODAL	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	2	02	06	01	0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	2	02	06	01	0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	2	02	10	02	0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	2	02	10	02	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	2	02	18			Belanja Modal Rambu-Rambu	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	2	02	18	01		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	05	5	2	02	18	01	0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06							Pelayanan Informasi Publik	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	06	5	1					BELANJA OPERASI	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	06	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	10,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	06	5	1	02	01			Belanja Barang	3,900,000.00	3,900,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	06	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	3,900,000.00	3,900,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	06	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3,900,000.00	3,900,000.00	-	100.00

2.16	19	02	2.01	06	5	1	02	02			Belanja Jasa	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	1	02	02	01	0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	6,100,000.00	6,100,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	06	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6,100,000.00	6,100,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	06	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,100,000.00	6,100,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	06	5	2					BELANJA MODAL	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	2	02	05	01	0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	2	02	05	02		Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	2	02	05	02	0001	Belanja Modal Mebel	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	2	02	05	02	0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	06	5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	10							Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	10,000,000.00	9,892,650.00	107,350.00	98.93
2.16	19	02	2.01	10	5	1					BELANJA OPERASI	10,000,000.00	9,892,650.00	107,350.00	98.93
2.16	19	02	2.01	10	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	9,892,650.00	107,350.00	98.93
2.16	19	02	2.01	10	5	1	02	01			Belanja Barang	3,720,000.00	3,612,650.00	107,350.00	97.11
2.16	19	02	2.01	10	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	3,720,000.00	3,612,650.00	107,350.00	97.11
2.16	19	02	2.01	10	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	540,450.00	539,100.00	1,350.00	99.75

2.16	19	02	2.01	10	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	232,000.00	232,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	10	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	426,750.00	320,750.00	106,000.00	75.16
2.16	19	02	2.01	10	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	404,800.00	404,800.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	10	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,116,000.00	2,116,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	10	5	1	02	01	01	0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	10	5	1	02	02			Belanja Jasa	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	10	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	10	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,000,000.00	3,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	10	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	3,280,000.00	3,280,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	10	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,280,000.00	3,280,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	10	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,280,000.00	3,280,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	12							Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	800,000,000.00	795,098,300.00	4,901,700.00	99.39
2.16	19	02	2.01	12	5	1					BELANJA OPERASI	800,000,000.00	795,098,300.00	4,901,700.00	99.39
2.16	19	02	2.01	12	5	1	01				Belanja Pegawai	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	800,000,000.00	795,098,300.00	4,901,700.00	99.39
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	01			Belanja Barang	17,580,000.00	17,580,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	17,580,000.00	17,580,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41,600.00	41,600.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	406,000.00	406,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6,558,500.00	6,558,500.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	240,000.00	240,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3,416,400.00	3,416,400.00	-	100.00

2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,917,500.00	6,917,500.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	01	01	0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	02			Belanja Jasa	751,220,000.00	746,318,300.00	4,901,700.00	99.35
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	742,220,000.00	737,318,300.00	4,901,700.00	99.34
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	60,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	02	01	0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	682,220,000.00	677,318,300.00	4,901,700.00	99.28
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	02	12	0002	Belanja Sosialisasi	9,000,000.00	9,000,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	31,200,000.00	31,200,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31,200,000.00	31,200,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	12	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31,200,000.00	31,200,000.00	-	100.00
2.16	19	02	2.01	12	5	2					BELANJA MODAL	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	2	02	06	01		Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	2	02	06	01	0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	2	02	06	01	0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	-
2.16	19	02	2.01	12	5	2	02	10	02	0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	-	-	-	-

2.16	19	03									PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3,961,200,000.00	3,924,404,850.00	36,795,150.00	99.07
2.16	19	03	2.01								Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,133,330,800.00	3,104,570,700.00	28,760,100.00	99.08
2.16	19	03	2.01	03							Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3,133,330,800.00	3,104,570,700.00	28,760,100.00	99.08
2.16	19	03	2.01	03	5	1					BELANJA OPERASI	3,133,330,800.00	3,104,570,700.00	28,760,100.00	99.08
2.16	19	03	2.01	03	5	1	01				Belanja Pegawai	-	-	-	-
2.16	19	03	2.01	03	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-
2.16	19	03	2.01	03	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	-	-	-	-
2.16	19	03	2.01	03	5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	3,133,330,800.00	3,104,570,700.00	28,760,100.00	99.08
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	01			Belanja Barang	2,670,400.00	2,670,400.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	2,670,400.00	2,670,400.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	247,000.00	247,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	770,400.00	770,400.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,653,000.00	1,653,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	02			Belanja Jasa	2,777,872,000.00	2,756,740,300.00	21,131,700.00	99.24
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	2,773,872,000.00	2,752,740,300.00	21,131,700.00	99.24
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2,773,872,000.00	2,752,740,300.00	21,131,700.00	99.24
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	02	03		Belanja Sewa Tanah	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	02	03	0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	4,000,000.00	4,000,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	341,588,400.00	333,960,000.00	7,628,400.00	97.77
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	341,588,400.00	333,960,000.00	7,628,400.00	97.77
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	03	02	0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	341,588,400.00	333,960,000.00	7,628,400.00	97.77
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	11,200,000.00	11,200,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11,200,000.00	11,200,000.00	-	100.00

2.16	19	03	2.01	03	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,200,000.00	11,200,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.01	03	5	2					BELANJA MODAL	-	-	-	-
2.16	19	03	2.01	03	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
2.16	19	03	2.01	03	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	-	-	-	-
2.16	19	03	2.01	03	5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	-
2.16	19	03	2.01	03	5	2	02	10	02	0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02								Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	827,869,200.00	819,834,150.00	8,035,050.00	99.03
2.16	19	03	2.02	01							Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	274,569,200.00	274,089,150.00	480,050.00	99.83
2.16	19	03	2.02	01	5	1					BELANJA OPERASI	274,569,200.00	274,089,150.00	480,050.00	99.83
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	274,569,200.00	274,089,150.00	480,050.00	99.83
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	01			Belanja Barang	14,560,000.00	14,560,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	14,560,000.00	14,560,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	232,000.00	232,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1,017,600.00	1,017,600.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9,435,000.00	9,435,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,120,400.00	1,120,400.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2,755,000.00	2,755,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	02			Belanja Jasa	260,009,200.00	259,529,150.00	480,050.00	99.82
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	260,009,200.00	259,529,150.00	480,050.00	99.82
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,600,000.00	8,600,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	251,409,200.00	250,929,150.00	480,050.00	99.81
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	-	-

2.16	19	03	2.02	01	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	03							Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	03	5	1					BELANJA OPERASI	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	03	5	1	01				Belanja Pegawai	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	03	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	03	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	03	5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	03	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	03	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	03	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	03	5	1	02	03	02	0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	35,000,000.00	35,000,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	03	5	2					BELANJA MODAL	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	03	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	03	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	03	5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	03	5	2	02	10	02	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	07							Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	418,300,000.00	413,595,000.00	4,705,000.00	98.88
2.16	19	03	2.02	07	5	1					BELANJA OPERASI	268,300,000.00	264,270,000.00	4,030,000.00	98.50
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	268,300,000.00	264,270,000.00	4,030,000.00	98.50
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	01			Belanja Barang	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-

2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	02			Belanja Jasa	268,300,000.00	264,270,000.00	4,030,000.00	98.50
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	123,000,000.00	119,400,000.00	3,600,000.00	97.07
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	39,000,000.00	39,000,000.00	-	100.00
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	84,000,000.00	80,400,000.00	3,600,000.00	95.71
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	145,300,000.00	144,870,000.00	430,000.00	99.70
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	145,300,000.00	144,870,000.00	430,000.00	99.70
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	07	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	07	5	2					BELANJA MODAL	150,000,000.00	149,325,000.00	675,000.00	99.55
2.16	19	03	2.02	07	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150,000,000.00	149,325,000.00	675,000.00	99.55
2.16	19	03	2.02	07	5	2	02	05			Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	150,000,000.00	149,325,000.00	675,000.00	99.55
2.16	19	03	2.02	07	5	2	02	05	01		Belanja Modal Alat Kantor	150,000,000.00	149,325,000.00	675,000.00	99.55
2.16	19	03	2.02	07	5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	150,000,000.00	149,325,000.00	675,000.00	99.55
2.16	19	03	2.02	09							Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	100,000,000.00	97,150,000.00	2,850,000.00	97.15
2.16	19	03	2.02	09	5	1					BELANJA OPERASI	100,000,000.00	97,150,000.00	2,850,000.00	97.15
2.16	19	03	2.02	09	5	1	01				Belanja Pegawai	800,000.00	-	800,000.00	-
2.16	19	03	2.02	09	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800,000.00	-	800,000.00	-
2.16	19	03	2.02	09	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	800,000.00	-	800,000.00	-
2.16	19	03	2.02	09	5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800,000.00	-	800,000.00	-
2.16	19	03	2.02	09	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	99,200,000.00	97,150,000.00	2,050,000.00	97.93
2.16	19	03	2.02	09	5	1	02	01			Belanja Barang	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-
2.16	19	03	2.02	09	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	1,900,000.00	-	1,900,000.00	-
2.16	19	03	2.02	09	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	52,000.00	-	52,000.00	-
2.16	19	03	2.02	09	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	321,000.00	-	321,000.00	-

2.16	19	03	2.02	09	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	428,000.00	-	428,000.00	-
2.16	19	03	2.02	09	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,099,000.00	-	1,099,000.00	-
2.16	19	03	2.02	09	5	1	02	02			Belanja Jasa	97,300,000.00	97,150,000.00	150,000.00	99.85
2.16	19	03	2.02	09	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	97,300,000.00	97,150,000.00	150,000.00	99.85
2.16	19	03	2.02	09	5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	97,300,000.00	97,150,000.00	150,000.00	99.85
2.16	19	03	2.02	10							Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	10	5	1					BELANJA OPERASI	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	10	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	10	5	1	02	01			Belanja Barang	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	10	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	10	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	10	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	10	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	10	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	10	5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	10	5	1	02	02			Belanja Jasa	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	10	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	10	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	10	5	1	02	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
2.16	19	03	2.02	10	5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	-
2.20	19	02									PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	205,947,800.00	205,209,700.00	738,100.00	99.64
2.20	19	02	2.01								Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	205,947,800.00	205,209,700.00	738,100.00	99.64
2.20	19	02	2.01	02							Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	85,447,800.00	84,817,700.00	630,100.00	99.26
2.20	19	02	2.01	02	5	1					BELANJA OPERASI	85,447,800.00	84,817,700.00	630,100.00	99.26

2.20	19	02	2.01	02	5	1	01				Belanja Pegawai	800,000.00	800,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	02	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	800,000.00	800,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	02	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	800,000.00	800,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	02	5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	800,000.00	800,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	84,647,800.00	84,017,700.00	630,100.00	99.26
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	01			Belanja Barang	10,947,700.00	10,947,700.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	10,947,700.00	10,947,700.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,160,000.00	1,160,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	290,600.00	290,600.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	40,000.00	40,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,827,000.00	2,827,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,630,100.00	6,630,100.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	02			Belanja Jasa	73,700,100.00	73,070,000.00	630,100.00	99.15
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	8,700,000.00	8,665,000.00	35,000.00	99.60
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,700,000.00	3,665,000.00	35,000.00	99.05
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5,000,000.00	5,000,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	65,000,100.00	64,405,000.00	595,100.00	99.08
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	65,000,100.00	64,405,000.00	595,100.00	99.08
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	04			Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	-	-
2.20	19	02	2.01	02	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-
2.20	19	02	2.01	03							Membangun Metadata Statistik Sektoral	120,500,000.00	120,392,000.00	108,000.00	99.91
2.20	19	02	2.01	03	5	1					BELANJA OPERASI	120,500,000.00	120,392,000.00	108,000.00	99.91
2.20	19	02	2.01	03	5	1	01				Belanja Pegawai	1,300,000.00	1,300,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	03	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,300,000.00	1,300,000.00	-	100.00

2.20	19	02	2.01	03	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	1,300,000.00	1,300,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	03	5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1,300,000.00	1,300,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	03	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	119,200,000.00	119,092,000.00	108,000.00	99.91
2.20	19	02	2.01	03	5	1	02	01			Belanja Barang	39,200,000.00	39,200,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	39,200,000.00	39,200,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-
2.20	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	464,000.00	464,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	35,044,500.00	35,044,500.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	30,000.00	30,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3,110,500.00	3,110,500.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	551,000.00	551,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	03	5	1	02	02			Belanja Jasa	80,000,000.00	79,892,000.00	108,000.00	99.87
2.20	19	02	2.01	03	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	03	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100.00
2.20	19	02	2.01	03	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	73,500,000.00	73,392,000.00	108,000.00	99.85
2.20	19	02	2.01	03	5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	73,500,000.00	73,392,000.00	108,000.00	99.85
2.21	19	02									PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	164,500,000.00	161,792,110.00	2,707,890.00	98.35
2.21	19	02	2.01								Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	32,922,500.00	32,922,500.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03							Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	32,922,500.00	32,922,500.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	1					BELANJA OPERASI	26,022,500.00	26,022,500.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	1	01				Belanja Pegawai	-	-	-	-
2.21	19	02	2.01	03	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-
2.21	19	02	2.01	03	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	-	-	-	-
2.21	19	02	2.01	03	5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-

2.21	19	02	2.01	03	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	26,022,500.00	26,022,500.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	01			Belanja Barang	1,672,300.00	1,672,300.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	1,672,300.00	1,672,300.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	580,000.00	580,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	-
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,092,300.00	1,092,300.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	02			Belanja Jasa	20,510,200.00	20,510,200.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	20,510,200.00	20,510,200.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20,510,200.00	20,510,200.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-	-	-	-
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	-	-	-	-
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	03	02	0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	-	-	-	-
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	3,840,000.00	3,840,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,840,000.00	3,840,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,840,000.00	3,840,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	2					BELANJA MODAL	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	2	02	06			Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	2	02	06	02		Belanja Modal Alat Komunikasi	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	2	02	06	02	0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	6,900,000.00	6,900,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.01	03	5	2	02	06	02	0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	-	-	-	-
2.21	19	02	2.01	03	5	2	02	10			Belanja Modal Komputer	-	-	-	-

2.21	19	02	2.01	03	5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer	-	-	-	-
2.21	19	02	2.01	03	5	2	02	10	02	0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	-	-	-	-
2.21	19	02	2.02								Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	131,577,500.00	128,869,610.00	2,707,890.00	97.94
2.21	19	02	2.02	01							Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	131,577,500.00	128,869,610.00	2,707,890.00	97.94
2.21	19	02	2.02	01	5	1					BELANJA OPERASI	131,577,500.00	128,869,610.00	2,707,890.00	97.94
2.21	19	02	2.02	01	5	1	01				Belanja Pegawai	500,000.00	500,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	01	5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500,000.00	500,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	01	5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	500,000.00	500,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	01	5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	500,000.00	500,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02				Belanja Barang dan Jasa	131,077,500.00	128,369,610.00	2,707,890.00	97.93
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	01			Belanja Barang	14,519,500.00	14,519,500.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	14,519,500.00	14,519,500.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13,384,000.00	13,384,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	348,000.00	348,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	15,000.00	15,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	-	-	-	-
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	772,500.00	772,500.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-	-	-
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	02			Belanja Jasa	106,120,000.00	106,120,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor	106,120,000.00	106,120,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2,500,000.00	2,500,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	02	01	0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	103,620,000.00	103,620,000.00	-	100.00
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas	10,438,000.00	7,730,110.00	2,707,890.00	74.06
2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10,438,000.00	7,730,110.00	2,707,890.00	74.06

2.21	19	02	2.02	01	5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,438,000.00	7,730,110.00	2,707,890.00	74.06
											JUMLAH BELANJA	10,944,739,711.00	10,708,691,882.90	236,047,828.10	97.84
											SURPLUS / DEFISIT	(10,944,739,711.00)	(10,708,691,882.90)	(236,047,828.10)	97.84
											SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(10,944,739,711.00)	(10,708,691,882.90)	(236,047,828.10)	97.84

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan kinerja instansi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

C. DATA UMUM ORGANISASI

1. Personil
2. Sarana dan Prasarana
3. Pembiayaan

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Tujuan
2. Sasaran dan Indikator Sasaran

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

Program dan Kegiatan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

A.1 Pencapaian Kinerja

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

A.5 Analisa Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan

A.6 Analisa Atasn Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A.7 Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Pencapaian Kinerja

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016-2021
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. Lampiran lainnya, (penghargaan, Inovasi dll.)

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB 2

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Kemudian Rencana Strategis OPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, tertuang di dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran bidang pengolahan data elektronik untuk kurun waktu selama lima tahun ke depan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan mempertimbangkan segala potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas KOMINFO Kabupaten Lamongan sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Visi dan Misi

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Lamongan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

a. Visi

Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lamongan, maka visi Kabupaten Lamongan yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- 1) **Terwujudnya** terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
- 2) **Lamongan** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
- 3) **Lebih Sejahtera** dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
- 4) **Lebih Berdaya saing** dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 misi sebagai berikut yaitu :

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan** dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

2. **Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah** dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih, serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian.
 3. **Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan** dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, pemukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian
 4. **Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik** dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang professional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat
 5. **Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal** dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung stabilitasi politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.
- Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tertuang dalam **misi 4** yaitu: ***Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.***

1. Tujuan

Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan

Terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik governance (e-GOV)

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai Renstra tahun (2016– 2021), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

1. Meningkatnya Implementasi e-GOV, e-GOV terintegrasi

Indikator Kinerja :

- ❖ Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi : 15%
- ❖ Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik : 100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Pemeringkatan e-GOV/SPBE	Meningkatnya implementasi e-GOV	Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi
			Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan tahun 2021 terdiri dari 1 sasaran yaitu meningkatnya kualitas implementasi e-GOV dengan indikator kinerja, persentase e-GOV OPD yang terintegrasi dan persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
1.	Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV	Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi	15 %
		Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	100%

Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2021 pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dengan program :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 2. Program Aplikasi Informatika
 - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Urusan Statistik diimplementasikan melalui program dan kegiatan :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi

- Membangun Metadata Statistik Sektoral

Urusan Persandian diimplementasikan melalui program dan kegiatan :

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Operasionalisasi Jalin Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja juga mengandung arti suatu lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Bentuk perjanjian kinerja ini dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang memiliki tujuan khusus antara lain :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan maupun sanksi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2021 telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Akuntabilitas Kinerja

BAB
3

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kinerja (Renja) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Komunikasi dan Informatika serta pelaksanaan perencanaan tersebut pada tahun berjalan sebagai fungsi Actuating, hingga sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021

A.1 PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Implementasi e-GOV, e-GOV terintegrasi	Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi	15%	15.78%	105.2%
	Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%

Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada indikator Kinerja 1 yaitu Meningkatkan Implementasi e-GOV dengan indikator Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi terealisasi sebesar 15.78% dari target 15% dengan capaian 105.2%.

Indikator Kinerja 2 yaitu Terwujudnya pelayanan penyebarluasan informasi yang tepat dan akurat dengan indikator Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik terealisasi sebesar 100% dari target 100% dengan capaian 100%.

A.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

- Perbandingan Tahun 2021 dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi	
			2020	2021
Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV	Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi	15%	13.2%	15.78%
	Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	95%	100%

Dari tabel yang membandingkan tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat bahwa realisasi pada indikator kinerja ke-1 dengan indikator persentase e-GOV OPD yang terintegrasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan indikator kinerja ke-2 dengan indikator persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan dari tahun 2020.

A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Akhir Periode RPJMD/RENSTRA
Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV	Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi	15%	15.78%	15%
	Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%

Dari tabel yang membandingkan tahun 2020 dengan akhir periode RPJMD/RENSTRA dapat dilihat bahwa realisasi pada indikator kinerja ke-1 dengan indikator persentase e-GOV OPD yang terintegrasi tercapai 15.78% dengan target akhir periode RPJMD/RENSTRA 15% dan pada indikator kinerja ke-2 dengan indikator persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik pada tahun 2021 tercapai 100% dengan target akhir periode RPJMD/RENSTRA 100%.

A.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Sasaran pada diskominfo kabupaten lamongan apabila di bandingkan dengan sasaran yang ada pada Kemenkominfo terlihat pada table di bawah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2021	Nasional	2021	Nasional
Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV	Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi	15.78%		105.2%	
	Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	100%		100%	

Target kabupaten lamongan di bidang komunikasi dan informatika yaitu SPBE minimal baik, pada 2021 nilai SPBE lamongan adalah 3.32. Apabila dibandingkan dengan pencapaian instansi pusat yang mencapai Indeks 3.82. Kabupaten lamongan sudah melampaui targetnya yaitu dengan target target indeks SPBE 3.14.

A.5 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN YANG TELAH DILAKUKAN

1. Realisasi sasaran pada indikator kinerja 1 yaitu : Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi tahun 2021 mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 15.78% dari target sebesar 15 % dengan persentase capaian sebesar 105.2 %. Hal ini di dukung oleh OPD yang telah terintegrasi diantaranya : RSUD SUGIRI, Bag. Pemerintahan, Disduk Pencapil, BAPPEDA, BPKAD, BKD, Diskominfo, Bappenda, DPMPSTP, Dinkes, TPHP, ULP, PMD, Pembangunan, Disperindag, Dinas Perikanan, Disbudpar, Dinkop, Bag. Hukum, Disnaker, Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan, Bag. Organisasi, PPKB, Inspektorat,

Balitbang, Dishub, Dinas Arsip, Kecamatan Brondong, Kecamatan Lamongan, Kecamatan Sugio, Kecamatan Kembangbahu, Dinsos, Dinas Ketahanan Pangan, PU SDA, Kecamatan Sambeng.

Realisasi indikator kinerja 2 yaitu : Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik tahun 2021 telah mencapai realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan prosentase capaian sebesar 100%. Hal ini dikarenakan capaian kinerja sesuai target kinerja yang telah ditentukan.

A.6 ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatkan kualitas implementasi e-GOV	Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi	105,2%	98,99%	6,21%
		Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	98,31%	1,69%

Dari tabel efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada :

1. Indikator kinerja 1 yaitu Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi tingkat efisiensi sebesar **6.21%** karena prosentase capaian kinerja diatas 100% yaitu 105.2% sedangkan prosentase capaian anggaran dibawah 100% yaitu 98.99%
2. Indikator kinerja 2 yaitu Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik tingkat efisiensi sebesar **1.69%** karena prosentase capaian kinerja sesuai 100% yaitu 100 % sedangkan prosentase capaian anggaran dibawah 100% yaitu 98.31%

A.7 ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN PENCAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja pada Dinas komunikasi dan informatika ditunjukkan dengan indikator sasaran Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi dan Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik, yang dalam pencapaiannya di tunjang oleh program dan kegiatan di tiga bidang di Diskominfo. Seperti dijelaskan ditabel di bawah ini

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG
1.	Meningkatkan kualitas implementasi e-GOV	Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi	105.2%	Program Aplikasi dan Informatika
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
				Membangun Metadata Statistik Sektoral
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
				Operasionalisasi Jalin Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

		Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	Program Informasi dan Komunikasi Publik
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Pelayanan Informasi Publik
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2021

VISI : Terwujudnya Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing

Misi : Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	REALISASI				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya Sistem Informasi dan Komunikasi yang Mantap untuk Mendukung Pelayanan Publik	Nilai/ Pemeringkatan e-Government Indonesia / SPBE	Penilaian Kemenkominfo/ Kemenpan	Peringkat 4	Peringkat 4 Indeks SPBE (3.11) ⁰	Peringkat 3 Indeks SPBE (3.40)	Indeks SPBE (3.50) Penilaian Mandiri	Peringkat 2 Indeks SPBE (3.32)

CATATAN:

- ❖ Sejak tahun 2018 penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) diiadakan dan diganti dengan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga sejak tahun 2018 target dan capaian RPJMD dari yang semula peringkat menjadi Indeks. Hal ini semampang dengan adanya komitmen antara Kemenpan dan Kemenkominfo untuk mengalihkan penilaian pemeringkatan e-GOV menjadi SPBE, yang dalam hal ini wewenang penilaian beralih dari Kemenkominfo ke Kemenpan RB sesuai dengan Permenpan RB no. 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE.

- ❖ Realisasi dan capaian kinerja RPJMD tahun 2018 terealisasi Indeks SPBE 3.11 (Peringkat 4). Pada tahun 2019 terealisasi Indeks SPBE 3.40, dengan Indeks SPBE tingkat Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan menduduki peringkat 3, sedangkan Indeks SPBE tingkat Nasional Kabupaten Lamongan menduduki Peringkat 12.
- ❖ Kemenpan RB dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid, hanya bisa melakukan evaluasi pada 131 K/L/D/I saja tidak semuanya, dan dipilih yang Indeks SPBE nya belum masuk kategori “BAIK”, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerapan SPBE pada K/L/D/I yang Indeks SPBE nya belum “BAIK” sedangkan Lamongan Indeks SPBE di tahun 2019 sudah 3.40 sehingga masuk dalam kategori “BAIK”. Dan disarankan untuk tetap melakukan evaluasi/penilaian mandiri.
- ❖ Penilaian mandiri yang dilakukan Diskominfo pada tahun 2020 dengan realisasi Indeks SPBE 3.50, dengan mengacu pada 3 Domain (Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola, Domain Layanan SPBE) dan 7 Aspek (Kebijakan tata kelola SPBE, Kebijakan Layanan SPBE, Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, TIK, Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik) penilaian.
- ❖ Realisasi dan capaian kinerja RPJMD tahun 2021 terealisasi Indeks SPBE 3.32 (Peringkat 2). dengan Indeks SPBE tingkat Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan menduduki peringkat 2, sedangkan Indeks SPBE tingkat Nasional Kabupaten Lamongan menduduki Peringkat 10.

B. REALISASI ANGGARAN

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. **6.028.647.800,00,-** dan terealisasi sebesar Rp. 5.982.880.722,50,- atau **99.24%**. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Kegiatan	Sebelum PAK	Setelah PAK	Realisasi	%	Sisa
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.764.002.200,00	1.697.000.000,00	1.691.474.062,50	99,67%	5.525.937,50
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.581.000.000,00	3.133.330.800,00	3.104.570.700,00	99,07%	36.795.150,00
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	977.000.000,00	827.869.200,00	819.834.150,00	99,03%	8.035.050,00

Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	215.447.800,00	205.947.800,00	205.209.700,00	99,64%	738.100,00
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	140.600.000,00	32.922.500,00	32.922.500,00	100%	-
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	153.950.000,00	131.577.500,00	128.869.610,00	97,94%	2.707.890,00
J U M L A H	6.832.000.000,00	6.028.647.800,00	5.982.880.722,50	99,21%	53.802.127,00

Tabel dibawah ini merupakan Alokasi per indikator sasaran pembangunan urusan komunikasi dan informatika dari total anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan (rutin dan pembangunan) untuk mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan) pada PD.

Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran	% Anggaran
Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV	Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi	4.331.647.800	71,85%
	Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	1.697.000.000	28,15%

Adapun pencapaian kinerja dan anggaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika per indikator sasaran dijabarkan dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV	Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi	15%	15.78%	105.2%	4.331.647.800	4.288.046.660	98,99%
	Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	1.697.000.000	1.668.294.063	98,31%

P e n u t u p

**BAB
4**

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan **Sangat Berhasil** karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja yang telah diuraikan pada BAB 3 dapat dilihat bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat berhasil dicapai dengan baik, Keberhasilan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya pada pengembangan e-goverment di Kabupaten Lamongan mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan jaringan intra dan internet pada seluruh SKPD di Kabupaten Lamongan serta berbagai aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat

4.2 SARAN

Untuk dapat mencapai tugas-tugas yang dilaksanakan seperti sekarang ini maka perlu :

1. Dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas.
3. Melakukan inovasi tanpa henti di bidang teknologi guna menjawab tantangan globalisasi

Berikut adalah penghargaan yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika:

1. Dari tahun 2018 hingga 2021 Lamongan masuk dalam gerakan menuju 100 Smart City tingkat Nasional dan di tahun 2019 menempati peringkat 12 dari 75 Kabupaten/Kota se-Indonesia

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika yang menggambarkan capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran pada tahun 2021 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN**



ACHAND EDWIN ANEDI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19720205 199201 1 003

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2021

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun Anggaran : Tahun 2021

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN					% PENCAPAIAN TARGET	KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input</u> : Jumlah Dana <u>Output</u> : Jumlah Pengakses/Pengunjung Website dan Medsos Resmi Pemerintah	Rupiah Orang	1.697.000.000 50.000	1.668.294.063 146.145	98,31 292,29	
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	<u>Input</u> : Jumlah Dana <u>Output</u> : Jumlah Informasi yang disampaikan melalui web dan medsos resmi	Rupiah Informasi	200.000.000 350	200.000.000 680	100 194	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	<u>Input</u> : Jumlah Dana <u>Output</u> : Jumlah pengunjung / viewer website dan medsos resmi	Rupiah Orang	100.000.000 50.000	99.945.40 146.145	99,95 292,29	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	<u>Input</u> : Jumlah Dana <u>Output</u> : Jumlah masyarakat yg menerima informasi	Rupiah Orang	577.000.000 1200	576.537.712 1200	99,92 100	

		<u>Input :</u> Jumlah Dana	Rupiah	10.000.000	10.000.000	100	
		<u>Output :</u> Jumlah PPID Pembantu yang telah menjalankan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku	PPID	27	27	100	
		<u>Input :</u> Jumlah Dana	Rupiah	10.000.000	9.892.650	98,93	
		<u>Output :</u> Jumlah UKM, KIM, dan masyarakat yang dilatih, dibina, dan diberdayakan	Orang	50	50	100	
		<u>Input :</u> Jumlah Dana	Rupiah	800.000.000	778.018.300	97,25	
		<u>Output :</u> Jumlah informasi/berita positif yang disampaikan ke masyarakat melalui media cetak dan media elektronik	Informasi	120	167	139	
Program Aplikasi dan Informasi	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input :</u> Jumlah Dana	Rupiah	3.133.330.800	3.104.570.700	99,08	
		<u>Output :</u> Jumlah OPD yang telah menggunakan Domain dan sub domain resmi	OPD	10	10	100	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	<u>Input :</u> Jumlah Dana	Rupiah	3.133.330.800	3.104.570.700	99,08	
		<u>Output :</u> Jumlah infrastruktur	Titik	400	415	103,7	

		jaringan yang terpasang dan berfungsi dengan baik					
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah OPD yang e-GOV nya terintegrasi	Rupiah	827.869.200	819.834.150	99,03	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah indikator dalam SPBE yang telah terpenuhi minimal baik	Rupiah	274.569.200	274.089.150	99,83	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah basis data yang dikelola dan telah terintegrasi	Rupiah	35.000.000	35.000.000	100	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan diintegrasikan	Rupiah	418.300.000	413.595.000	98,88	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah Penerapan smart city pada OPD sesuai Masterplan Smart City	Rupiah	100.000.000	97.150.000	97,15	

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul dan terpublikasikan	Rupiah Data	205.947.800 15	205.209.700 15	99,64 100	
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah SDM statistik yang telah ditingkatkan kapasitasnya	Rupiah Orang	85.447.800 100	84.817.700 100	99,26 100	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah metadata statistik sektoral yang terpublikasi	Rupiah Data	120.500.000 15	120.392.000 15	99,91 100	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah Informasi Rahasia yang Diamankan	Rupiah Informasi	32.922.500 1	32.922.500 1	100 100	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah OPD yang telah menggunakan pelayanan persandian dalam rangka pengaman informasi milik pemerintah daerah	Rupiah OPD	32.922.500 75	32.922.500 75	99,17 100	

	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah OPD yang melakukan tata kelola persandian	Rupiah	131.577.500	128.869.610	97,94	
			OPD	5	5	100	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<u>Input :</u> Jumlah Dana <u>Output :</u> Jumlah berita/informasi yang tersampaikan ke OPD	Rupiah	131.577.500	128.869.610	97,94	
			Informasi	1500	1605	107	

**RENCANA STRATEGIS (RS)
TAHUN 2016 S.D 2021**

Instansi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMONGAN
Visi : " Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing "
Misi : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Ket
Uraian		Indikator	Kebijakan	Program	
Pemeringkatan e-GOV/SPBE	Meningkatnya implementasi e-GOV	Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi	Menerapkan konsep pelayanan informasi satu pintu/single window, yaitu dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk pelayanan publik	Aplikasi dan Informatika	
		Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	- Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya. - Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik.	Informasi dan Komunikasi Publik	



REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

NAMA : **Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.**
Jabatan : Bupati Lamongan
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Oktober 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

PIHAK PERTAMA
KEPALADINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN


ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19720205 199201 1 003

**REVIEW PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Implementasi e-Gov	Persentase e-GOV OPD yang terintegrasi	15 %
		Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	100%

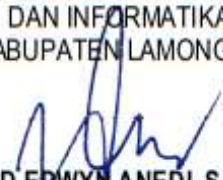
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya fungsi kesekretariatan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%
2	Meningkatnya aplikasi terintegrasi	Persentase Aplikasi terintegrasi	15 %
3	Meningkatnya Masyarakat yang memanfaatkan informasi publik	Persentase Data statistik sektoral yang dipublikasikan	32 %
4	Meningkatnya Data statistik sektoral yang dipublikasikan	Persentase informasi yang diamankan	5 %
5	Meningkatnya informasi yang diamankan	Persentase peningkatan Masyarakat yang memanfaatkan informasi publik	30%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.916.091.911,-	APBD
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)	Rp. 1.697.000.000,-	APBD
3. Program Aplikasi Informatika (APTIKA)	Rp. 3.961.200.000,-	APBD
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 205.947.800,-	APBD
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 164.500.000,-	APBD
Jumlah	Rp. 10.574.291.911,-	

BUPATI LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

Lamongan, Oktober 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN


ACHMAD EDWYN ANEDI, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720205 199201 1 003